

**PERANCANGAN MANAJEMEN RISIKO STRATEGIS PADA SPBE/E-  
GOVERNMENT BERDASARKAN PERMEN PANRB NOMOR 5 TAHUN 2020:  
STUDI KASUS PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**SPBE/E-GOVERNMENT STRATEGIC RISK MANAGEMENT DISASTER BASED  
ON PERMEN PANRB NO. 5 TAHUN 2020: CASE STUDY GOVERNMENT OF  
WEST BANDUNG REGENCY**

Karina Tarigan<sup>1</sup>, Lukman Abdurrahman<sup>2</sup>, Rahmat Mulyana<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom

<sup>1</sup>[karinatarigan@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:karinatarigan@student.telkomuniversity.ac.id), <sup>2</sup>[abdural@telkomuniversity.co.id](mailto:abdural@telkomuniversity.co.id),

<sup>3</sup>[rahmatmoelyana@telkomuniversity.ac.id](mailto:rahmatmoelyana@telkomuniversity.ac.id)

**Abstrak**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu penyelenggara program pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan berbasis elektronik atau yang biasa dikenal dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau *e-government* sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan adanya SPBE ini diharapkan dapat mempermudah dan meningkatkan layanan publik. Dalam pelaksanaan dan penerapan SPBE agar berjalan dengan baik maka perlu dilakukan penilaian terhadap risiko yang ada dengan cara mengidentifikasi serta menganalisis dampak yang mungkin diakibatkan dari risiko tersebut menggunakan ISO 31000 untuk tahapan manajemen risiko dan COBIT 5 *for risk* untuk penilaian risiko. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu instansi pemerintah wajib mengikuti arahan untuk menerapkan manajemen risiko dengan berpedoman pada Permen PANRB No. 5 Tahun 2020 tentang pedoman manajemen risiko. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi delapan risiko negatif dan enam risiko positif kemudian risiko tersebut dianalisis dan diolah dengan beberapa tahapan yaitu menetapkan konteks, melakukan penilaian risiko dan penanganan risiko. Dari hasil analisis risiko tersebut didapatkan hasil dokumentasi risiko teknologi informasi dan rekomendasi penanganan risiko dalam aspek personal yaitu penambahan kompetensi SDM dan penambahan deskripsi kerja kemudian aspek proses menghasilkan beberapa penyusunan kebijakan dan penyusunan SOP seperti penyusunan kebijakan pengelolaan anggaran SPBE, penyusunan kebijakan penggunaan sistem, penyusunan kebijakan pengelolaan SDM, penyusunan SOP penambahan kompetensi SDM dan yang terakhir dari aspek teknologi memberikan beberapa rekomendasi *tools* yang dapat diimplementasikan pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat seperti rekomendasi *tools* pengelolaan SDM, rekomendasi *tools* peningkatan kompetensi, rekomendasi *tools* pengelolaan dana.

**Kata kunci:** SPBE, Permen PANRB, Pemerintah KBB, Manajemen Risiko, Risiko Strategis.

**Abstract**

The Office of Communication, Information and Statistic of West Bandung Regency as one of organizers of government program in providing services to the public on an electronic based or commonly known as SPBE or E-government in accordance with Presidential Regulation No. 95 of 2018 concerning Electronic Based Government System. SPBE is expected to simplify and improve public services. In the implementation of SPBE so that it runs well then it is necessary to assess the existing risks by identifying and analyzing the impact that may result from these risks using ISO 31000 for the risk management stage and COBIT 5 *for risk* to risk assessment. The Office of Government West Bandung Regency as one of the government agencies must follow the directions to implement risk management based on PANRB Regulation No. 5 of 2020 concerning risk management guidelines. This research succeeded in identifying eight negative risks and six positive risks then the risks were analyzed and processed in several stages, namely setting the context, conducting risk assessments and managing risks. From the results of the risk analysis, information technology risk documentation and risk management recommendations are obtained in the aspects of personnel, namely the addition of HR competencies and additional work descriptions. HR management, preparation of SOP for adding HR competencies and the latest from the aspect of technology provides several recommendations for tools that can be implemented in the Government of West Bandung Regency such as recommendations for HR management tools, recommendations for competency improvement tools, and recommendations for fund management tools.

**Keywords:** SPBE, Permen PANRB, West Bandung Regency Government, Risk Management, Strategic Risk.

## 1. Pendahuluan

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat membuat banyak perubahan dan menimbulkan dampak yang signifikan bagi aktivitas manusia, hampir semua kegiatan memanfaatkan perkembangan tersebut termasuk sebuah instansi atau organisasi. Teknologi Informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras atau lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 2015). Penggunaan Teknologi Informasi juga dapat diimplementasikan dalam sistem pemerintahan demi menciptakan keselarasan TI dengan *e-government* dan menghasilkan kualitas layanan yang baik. Namun dengan semakin pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) maka semakin besar pula risiko yang akan ditimbulkan baik dari segi keamanan dan kerahasiaan data pada sistem pemerintahan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Agustus 2019 terhadap 616 instansi pemerintah, untuk kementerian 74% mencapai nilai baik, Lembaga Pemerintah Non kementerian (LPNK) 52% mencapai nilai baik, provinsi 41% mencapai nilai baik, kota 24% mencapai nilai baik dan kabupaten 8% mencapai nilai baik. Penerapan SPBE untuk membangun tata kelola pemerintahan yang cepat dan efisien (Imam Machdi, 2019) membuat penerapan SPBE harus jelas agar tidak berdampak pada membengkaknya anggaran negara. Penerapannya juga harus dilakukan secara merata di setiap daerah agar menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi serta berdampak positif bagi masyarakat. Maka dari itu untuk mengetahui seberapa besar dampak yang di timbulkan dari penerapan SPBE baik itu dari segi positif maupun negatif, perlu dilaksanakan Manajemen SPBE atau manajemen risiko yang akan di kelola sesuai dengan prinsip SPBE yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Maka akan dilakukan analisis dan penelitian di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat untuk merealisasikan hal tersebut. Dalam melakukan analisis terhadap risiko di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, terdapat 7 (tujuh) tahap proses manajemen risiko yaitu, Komunikasi dan konsultasi, Penetapan konteks, Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko Pemantauan dan *review* sesuai dengan yang tercantum pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.964/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Daerah Provinsi Jawa Barat. Proses analisis dan penelitian untuk melakukan penilaian risiko tersebut akan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 *for Risk*. COBIT merupakan seperangkat pedoman dan hasil dokumentasi yang berfungsi untuk membantu auditor, pemangku kepentingan atau pengguna dalam menghubungkan antara model kendali bisnis dan model kendali TI

## 2. Landasan teori

### 2.1 Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020

Bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Pada penelitian ini Permen digunakan karena sudah mengacu ke ISO 31000 dan COBIT 5 *for risk* serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang mengikat semua KLD (Kementerian, Lembaga dan Pemda).

### 2.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

### 2.3 Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, analisis, penilaian, penentuan prioritas dan pengendalian risiko untuk memantau, meminimalkan, dan mengendalikan kemungkinan atau dampak dari peristiwa yang tidak menguntungkan dan merugikan.

### 2.4 Manajemen Risiko Teknologi Informasi

Manajemen risiko Teknologi Informasi (TI) adalah kemampuan organisasi dalam mengurangi risiko-risiko TI yang

mungkin akan menghambat pencapaian tujuan organisasi terkait dengan pemanfaatan TI itu sendiri. Manajemen risiko merupakan suatu proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Salah satu manajemen risiko yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan ISO 31000.

## 2.5 ISO 31000:2018

ISO 31000 dapat digunakan oleh segala jenis organisasi dalam menghadapi berbagai risiko yang melekat pada aktivitas organisasi. ISO 31000 menyediakan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko yang dapat digunakan sebagai arsitektur manajemen risiko dalam usaha menjamin penerapan manajemen risiko yang efektif. Satu hal yang membedakan ISO 31000 dengan standar manajemen risiko yang lain adalah perspektif ISO 31000 yang lebih luas dan lebih konseptual dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini ditandai dengan adanya kerangka kerja manajemen risiko yang merupakan implementasi prinsip manajemen mutu dan dikenal dengan “*Plan-Do-CheckAction*”. Dalam kerangka kerja manajemen risiko, hal ini dinyatakan dengan perencanaan kerangka kerja manajemen risiko, penerapan manajemen risiko, *monitoring* dan *review* serta perbaikan berkelanjutan

## 2.6 COBIT

Kerangka kerja COBIT 5 mendefinisikan dan menjelaskan secara rinci sejumlah tata kelola dan manajemen proses. Kerangka kerja COBIT 5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen aset informasi perusahaan dan teknologi. Secara sederhana, membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara mewujudkan manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. Kerangka kerja COBIT 5 menggunakan praktik tata kelola dan manajemen untuk menjelaskan tindakan praktik yang baik untuk efek tata kelola dan manajemen teknologi informasi perusahaan. Kerangka kerja COBIT 5 terdiri dari 5 domain, yaitu EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA (ISACA, 2012)

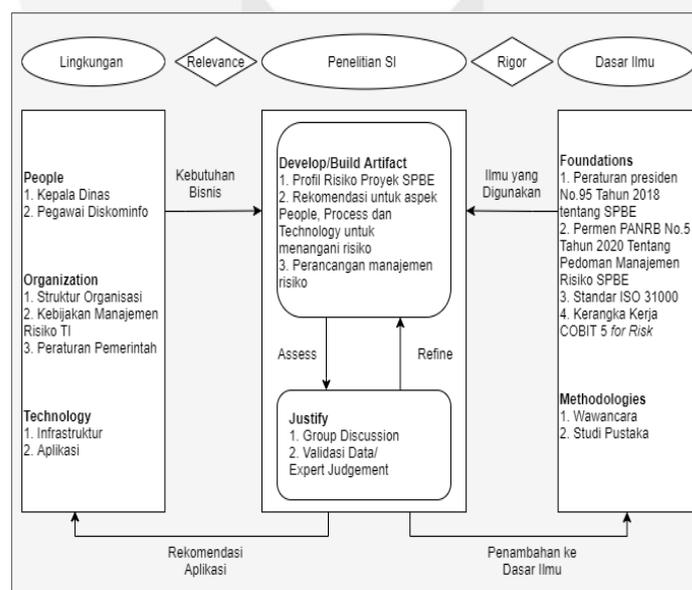
## 2.7 Alasan Pemilihan Metode

Metode yang digunakan ISO 31000:2018 dan COBIT 5 *for Risk*. Dalam penelitian ini ISO 31000:2018 dipilih karena sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 Pasal 47 ayat 2 yang berbunyi “Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE” dan menggunakan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 sebagai pedoman yang merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi

## 3. Metodologi Penelitian

### 3.1 Model Konseptual

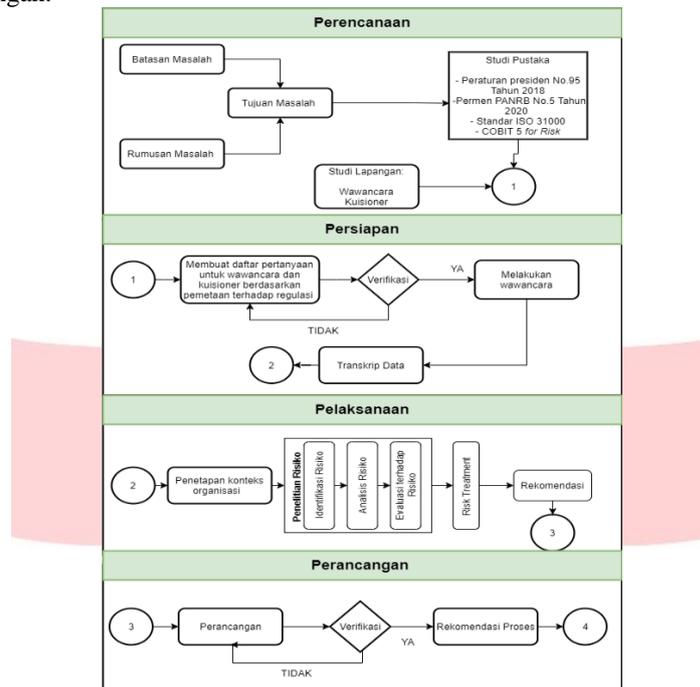
Tahap awal untuk melakukan penelitian ini dapat dimulai dari pemahaman tentang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dilakukan menggunakan kerangka kerja COBIT 5, terutama COBIT 5 *implementation* yang terbagi menjadi beberapa fase. Analisa dari fase tersebut yang nantinya akan menjadi dasar penelitian ini dan sebagai acuan dari penelitian ini. Model konseptual berikut ini di adaptasi dari Design Science Research Hevner.



Gambar 1 Model Konseptual

### 3.2 Sistematika Penelitian

Terdapat empat tahapan yang dilakukan yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan terakhir tahap perancangan.



Gambar 2 Sistematika Penelitian

## 4. Analisis Data

### 4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan data menjadi dua bagian, yaitu data primer dan sekunder. Kedua data ini didapatkan melalui analisis dokumen, wawancara dan observasi.

#### 4.1.1 Kebutuhan Data

Berikut ini merupakan kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

##### 1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapatkan dari hasil melakukan interaksi secara langsung dengan pihak terkait. Pada penelitian ini pengambilan data primer dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi secara langsung.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sumbernya berasal dari bahan kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian maupun diperoleh dari penelitian sebelumnya.

#### 4.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Berikut merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan data dengan melakukan interaksi tanya jawab secara langsung dengan yang bersangkutan oleh pewawancara.

##### 2. Analisis Dokumen

Analisis Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara menganalisis dokumen terkait yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

##### 3. Observasi

Observasi adalah tahapan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini pada objek penelitian dengan melakukan peninjauan secara langsung untuk dapat memenuhi dan melengkapi hasil wawancara dan analisis dokumen.

## 4.2 Objek Penelitian

### 4.2.1 Profil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat merupakan hasil dari pemekaran dari Kabupaten Bandung yang telah diresmikan pada

tanggal 2 Januari 2007. Terletak di provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang. Kabupaten Bandung Barat memiliki ibu kota Ngamprah yang pemerintahannya di pimpin oleh Bupati ( Aa Umbara Sutisna) dan Wakil Bupati (Hengky Kurniawan) masa bakti 20 September 2018 – 20 September 2023.

### **4.3 Analisis Data**

#### **4.3.1 Informasi Umum**

Informasi Umum berisi informasi gambaran umum dari unit kerja yang menerapkan manajemen risiko seperti Unit Pemilik Risiko pada objek penelitian kemudian tugas dan fungsi dari Unit Pemilik Risiko serta periode waktu lamanya itu berlaku. Unit Pemilik Risiko pada penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

#### **4.3.2 Kriteria Risiko SPBE**

Penetapan Kriteria Risiko SPBE bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak Risiko SPBE yang dapat terjadi. Kriteria Risiko SPBE ini ditinjau secara berkala dan perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. (Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020)

##### **4.3.2.1 Kriteria Kemungkinan SPBE**

Kriteria kemungkinan SPBE ditentukan melalui tingkat persentase peluang kejadian suatu risiko dalam satuan waktu yang bertujuan untuk dapat melakukan penilaian terhadap risiko SPBE.

##### **4.3.2.2 Kriteria Dampak SPBE**

Kriteria dampak SPBE didapatkan dari seberapa besarnya akibat yang terjadi pada suatu risiko dalam penjabaran tujuh area dampak risiko SPBE sebelumnya. Kriteria dampak SPBE dijabarkan dalam bentuk risiko negatif maupun risiko positif yang masing-masing memiliki lima level dampak. Kriteria Dampak berikut ini merupakan referensi dari Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat mengenai Penerapan Manajemen Risiko.

#### **4.3.3 Matriks Analisis Risiko SPBE**

Matriks analisis risiko SPBE digunakan untuk mendapatkan hasil nilai besaran risiko SPBE yang di representasikan dalam bentuk angka. Angka tersebut didapatkan melalui perhitungan antara level kriteria dampak risiko dan level kriteria kemungkinan risiko.

#### **4.3.4 Level Risiko SPBE**

Level risiko SPBE merupakan pengelompokan berdasarkan hasil rentang besaran risiko SPBE yang didapatkan dari analisis matriks sebelumnya. Pengelompokan level risiko menggunakan lima kategori dengan besaran rentang risiko yang telah ditentukan dan dilengkapi dengan keterangan warna yang sesuai preferensi masing-masing

#### **4.3.5 Selera risiko SPBE**

Selera risiko SPBE bertujuan untuk memberikan acuan dalam menentukan ambang Batasan minimum terhadap nilai besaran risiko SPBE sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui risiko SPBE mana yang harus ditangani untuk setiap kategori baik itu risiko positif maupun risiko negatif. Selera Risiko SPBE berikut ini ditetapkan berdasarkan analisis terhadap selera risiko yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam Perbub.

#### **4.3.6 Identifikasi Risiko SPBE**

Identifikasi risiko SPBE merupakan proses menggali informasi mengenai kejadian, penyebab dan dampak risiko SPBE. Informasi yang dicantumkan meliputi sasaran SPBE, indikator kinerja, jenis risiko SPBE, kejadian, penyebab, kategori, dampak, dan area dampak. (Permen PANRB No.5 Tahun 2020)

#### **4.3.7 Analisis Risiko SPBE**

Analisis Risiko SPBE merupakan proses untuk melakukan penilaian atas Risiko SPBE yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisis Risiko SPBE dilakukan dengan cara menentukan sistem pengendalian, level kemungkinan, dan level dampak terjadinya Risiko SPBE. Berikut informasi yang dicantumkan pada analisis Risiko SPBE meliputi sistem pengendalian, level kemungkinan, level dampak, besaran risiko, dan level risiko. (Permen PANRB No.5 Tahun 2020)

#### **4.3.8 Evaluasi Risiko SPBE**

Evaluasi risiko SPBE berisi hasil keputusan penanganan risiko SPBE perlu atau tidaknya mendapatkan upaya penanganan risiko. Pengambilan keputusan penanganan yang acuannya berdasarkan selera risiko tersebut kemudian diurutkan sesuai prioritas penanganannya berdasarkan besaran risiko.

#### 4.3.9 Rencana Penanganan

Rencana penanganan Risiko SPBE merupakan agenda kegiatan untuk menangani Risiko SPBE agar mencapai Selera Risiko SPBE yang telah ditetapkan. Berikut ini yang terdapat dalam rencana penanganan risiko SPBE yaitu risiko yang terkait, kejadiannya, prioritas risiko dan keputusan penanganan.

### 5. Perancangan

#### 5.1 Rencana Perancangan Rekomendasi

Rencana perancangan rekomendasi berasal dari hasil analisis data yang menghasilkan rekomendasi terkait skenario risiko berdasarkan tiga aspek yaitu aspek personil, proses dan teknologi. Rekomendasi yang dihasilkan berupa penambahan dan penyusunan.

Tabel 1 Rencana Perancangan Rekomendasi

No.	Aspek	Rekomendasi	ID Risiko
1	Personil	Penambahan Kompetensi SDM	N3, N7, N8
2		Penambahan Deskripsi Kerja	N1, N7
3	Proses	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Anggaran SPBE	N1, N3
4		Penyusunan Kebijakan Penggunaan Sistem	N7, N8
5		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan SDM	N1, N3, N7, N8
6		Penyusunan SOP Penambahan Kompetensi SDM	N3, N7, N8
7	Teknologi	Rekomendasi <i>Tools</i> Pengelolaan SDM	N3, N7, N8
8		Rekomendasi <i>Tools</i> Peningkatan Kompetensi	N3, N7, N8
9		Rekomendasi <i>Tools</i> Pengelolaan Dana	N1, N3

#### 5.2 Prioritas Rekomendasi

Prioritas rekomendasi untuk mengetahui rekomendasi mana yang harus dijalankan terlebih dahulu dan butuh penanganan secepatnya berdasarkan nilai dari hasil besaran risiko rata-rata dan level risiko rata-rata yang telah di kalkulasikan.

#### 5.3 Roadmap Implementasi Rekomendasi

*Roadmap* implementasi rekomendasi disusun berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya pada prioritas rekomendasi. Prioritas rekomendasi dengan nilai yang rendah akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Waktu penanganan di tentukan berdasarkan periode triwulan satu sampai dengan empat.

#### 5.4 Perancangan

Pada perancangan akan di bahas lebih jelas lagi mengenai rekomendasi dari setiap aspek yang sudah di hasilkan sebelumnya. Rancangan rekomendasi bertujuan untuk menangani risiko SPBE yang terdapat di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan tiga aspek yaitu personil, proses dan teknologi.

##### 5.4.1 Rekomendasi Aspek Personil

Rekomendasi aspek personil menjelaskan secara rinci tiap rekomendasi yang dihasilkan terkait aspek personil untuk menangani manajemen risiko yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Rekomendasi yang dihasilkan yaitu penambahan kompetensi SDM dan penambahan deskripsi kerja.

##### 5.4.1.1 Rekomendasi Penambahan Kompetensi SDM

Rekomendasi penambahan kompetensi SDM bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM agar dapat bekerja secara optimal dan memberikan hasil yang memuaskan. Meningkatkan kualitas SDM juga merupakan aset bagi perusahaan atau organisasi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Tabel 2 Rekomendasi Penambahan Kompetensi SDM

ID Risiko	Kompetensi	Target	Rekomendasi
N3	Meningkatkan kemampuan tentang pemahaman keamanan perangkat lunak	Staf Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi Seksi Infrastruktur dan Teknologi Bidang Aplikasi Informatika Pemerintahan	Mengadakan pelatihan bersertifikasi untuk staf tentang keamanan perangkat lunak
N3	Meningkatkan kemampuan	Staf Teknisi Alat Elektro	Mengadakan pelatihan bersertifikasi

ID Risiko	Kompetensi	Target	Rekomendasi
	tentang pemahaman keamanan jaringan	dan Alat Komunikasi Seksi Infrastruktur dan Teknologi Bidang Aplikasi Informatika Pemerintahan	untuk staf tentang keamanan jaringan
N7, N8	Meningkatkan kemampuan dalam memahami sistem atau aplikasi baru	Semua staf pengguna	Membuat panduan penggunaan serta sosialisasi kepada seluruh staf terkait
N7, N8	Meningkatkan kemampuan dalam menjalankan sistem atau aplikasi baru	Semua staf pengguna	Mengadakan praktik atau tes sederhana mengenai pengetahuan tentang menjalankan sistem atau aplikasi baru

#### 5.4.1.2 Rekomendasi Penambahan Deskripsi Kerja

Rekomendasi penambahan deskripsi kerja juga dapat meningkatkan kualitas SDM dan mengoptimalkan hasil yang didapatkan perusahaan atau organisasi.

Tabel 3 Rekomendasi Penambahan Deskripsi Kerja

ID Risiko	Target	Deskripsi Kerja
N1	Semua Kepala Bidang	Membuat rencana target dan prioritas kegiatan untuk penggunaan dana alokasi pemerintah
N7	Staf Pranata Komputer Seksi Infrastruktur dan Teknologi Bidang Aplikasi Informatika Pemerintahan	Melakukan pengecekan dan testing terhadap sistem atau aplikasi baru apakah sudah berjalan secara optimal
N1, N3, N7, N8	Staf <i>Assesor</i> SDM Aparatur Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Menetapkan standar penilaian dan pelaksanaan pengelolaan kompetensi SDM

#### 5.4.2 Rekomendasi Aspek Proses

Rekomendasi aspek proses menjelaskan secara rinci tiap rekomendasi yang dihasilkan terkait aspek proses untuk menangani manajemen risiko yang ada di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Rekomendasi yang dihasilkan yaitu penyusunan kebijakan dan penyusunan SOP.

##### 5.4.2.1 Rekomendasi Penyusunan Kebijakan

Rekomendasi penyusunan kebijakan bertujuan untuk meningkatkan kontrol proses dengan memberikan kebijakan yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

Tabel 4 Rekomendasi Penyusunan Kebijakan

ID Risiko	Rekomendasi Kebijakan	Deskripsi	Pemetaan Regulasi
N1, N3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Anggaran SPBE	Alokasi dana dari pemerintah yang jumlahnya tidak bias ditentukan membuat beberapa kendala dalam pemanfaatannya, untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan kebijakan dalam pengelolaan dana untuk mengetahui prioritas penggunaan dana agar target tetap tercapai	Paragraf 4 Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 16 ayat (3) dan (4)
N7, N8	Penyusunan Kebijakan Penggunaan Sistem	Mengadopsi sistem terbaru bertujuan agar penerapan SPBE dapat berjalan dengan baik namun dalam penerapannya masih banyak yang mengalami kesulitan dan belum berjalanya aplikasi secara optimal maka diperlukan membuat kebijakan penggunaan sistem	Paragraf 8 Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 25 ayat (3) dan (4)
N1, N3, N7, N8	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan SDM	Sumber daya manusia sangat penting untuk menunjang suksesnya penerapan SPBE dan peningkatan mutu layanan maka diperlukan adanya kebijakan pengelolaan SDM sebagai acuan	Paragraf 6 Manajemen Sumber Daya Manusia Pasal 40 ayat(5)

### 5.4.3 Rekomendasi Penyusunan SOP

Rekomendasi penyusunan SOP bertujuan untuk meningkatkan kontrol proses dengan memberikan standar yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

### 5.4.4 Rekomendasi Aspek Teknologi

Rekomendasi aspek teknologi yang diberikan untuk menunjang kegiatan pemerintahan dalam penerapan SPBE yang baik. Perancangan rekomendasi aspek teknologi yang penulis sarankan adalah peningkatan kompetensi karena sesuai dengan hasil penelitian yang rekomendasi teknologinya mendapatkan hasil risiko nilai tertinggi. Rekomendasi *tools* yang diberikan untuk di implementasikan adalah Hungalo.

Tabel 5 Rekomendasi Aspek Teknologi

Teknologi	Rekomendasi <i>Tools</i>	Deskripsi
Pengelolaan SDM	SIMPEG, Tools A, Tools B	Dapat digunakan sebagai sarana untuk mengelola kepegawaian
Peningkatan Kompetensi	Tools C, Tools D	Dapat digunakan sebagai sarana meningkatkan kompetensi SDM dengan melakukan pelatihan dan penilaian terhadap SDM.
Pengelolaan Dana	SIMDA Keuangan, Tools E	Dapat digunakan untuk membantu pengelolaan dana serta perencanaan alokasi dana prioritas

## 6. Kesimpulan

Dari hasil perancangan Manajemen Risiko Strategis SPBE yang telah dilakukan pada pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mendapatkan beberapa kesimpulan:

1. Analisis risiko strategis SPBE di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu menetapkan konteks, melakukan penilaian risiko dan penanganan risiko sesuai yang tercantum pada Permen PANRB nomor 5 Tahun 2020.
2. Rencana penanganan risiko strategis SPBE pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat didapatkan berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada Bab IV dan perancangan yang dilakukan pada bab V dan didapatkan hasil dokumentasi risiko teknologi informasi dan rekomendasi penanganan risiko dalam aspek personil, proses dan teknologi.
3. Rekomendasi rancangan solusi penanganan risiko aspek personil, proses dan teknologi untuk menangani risiko yang tidak dapat di toleransi pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
  - a. Rekomendasi aspek personil menghasilkan penambahan kompetensi SDM dan penambahan deskripsi kerja.
  - b. Pada aspek proses menghasilkan rekomendasi penanganan beberapa penyusunan kebijakan dan penyusunan SOP seperti penyusunan kebijakan pengelolaan anggaran SPBE, penyusunan kebijakan penggunaan sistem, penyusunan kebijakan pengelolaan SDM, penyusunan SOP penambahan kompetensi SDM.
  - c. Aspek teknologi memberikan beberapa rekomendasi *tools* yang dapat diimplementasikan pada Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat seperti rekomendasi *tools* pengelolaan SDM, rekomendasi *tools* peningkatan kompetensi, rekomendasi *tools* pengelolaan dana.

### Daftar Pustaka:

- [1] Ajismanto, F. (2017). Domain Analysis of COBIT Process Framework 5 In Worksheet Information System. *III*, 2-3.
- [2] Driantami, H. T., Suprpto, & Perdanakusuma, A. R. (2018). Analisis Risiko Teknologi Informasi Menggunakan ISO 31000. *II*, 2-3.
- [3] Firdaus, N. Z., & Suprpto. (2018). Evaluasi Manajemen Risiko Teknologi Informasi Menggunakan COBIT 5 IT Risk . *II*, 2-3.
- [4] Prabowo, W. S., Widyawan, A. N., & Muslim, H. (2017). Manajemen Risiko Infrastruktur Cloud Pemerintah Menggunakan NIST Framework. *VII*, 5-7.
- [5] Yani, A. (2018). Sistem Pmerintahan Indonesia. *XV*, 5-6.